

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	15
1.3 Tujuan Penelitian.....	16
1.4 Manfaat Penelitian.....	16
1.5 Sistematika Penulisan.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
2.1 Landasan Teori	19
2.1.1 Kepastian Hukum	19
2.1.2 Penafsiran Hukum	28
2.1.3 Ajaran Sifat Melawan Hukum.....	34
2.1.4 Pendekatan <i>Per Se Illegal</i> dan <i>Rule of Reason</i> dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha	44
2.2 Landasan Konseptual	49
2.2.1 Konsep <i>Nominee</i>	49

2.2.2	Persekongkolan Tender	56
BAB III METODE PENELITIAN		65
3.1	Pengertian, Obyek dan Lingkup Penelitian	65
3.1.1	Pengertian Penelitian	65
3.1.2	Ruang Lingkup dan Obyek Penelitian	67
3.2	Jenis Penelitian	70
3.3	Pendekatan Penelitian	70
3.4	Bahan Hukum	72
3.5	Teknik Pengumpulan Data	72
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS		74
4.1	Bentuk Praktik <i>Nominee</i> dan Unsur Pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 113 K/Pid.Sus/2020	74
4.1.1	Resume Perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor: 113 K/Pid.Sus/2020	74
4.1.2	Bentuk Praktik <i>Nominee</i> sebagai Modus Persekongkolan Tender dalam Perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor: 113 K/Pid.Sus/2020	83
4.1.3	Unsur Pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 dalam Perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor: 113 K/Pid.Sus/2020	88
4.2	Problematika Pengaturan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 Dihadapkan dengan Studi Kasus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 113 K/Pid.Sus/2020	99
4.2.1	Persoalan dari Segi Penggunaan Pendekatan <i>Rule of Reason</i>	99
4.2.2	Persoalan dari Segi Penafsiran Rumusan Norma	105

BAB V PENUTUP.....	113
5.1 Kesimpulan.....	113
5.2 Saran.....	116
DAFTAR PUSTAKA.....	118



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Daftar Perusahaan Pemenang Lelang Pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan DAK TA 2017.....	77
Tabel 4.2 Daftar Perusahaan Pemenang Lelang Pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan DAK TA 2018.....	79
Tabel 4.3 Unsur Perbuatan dan Akibat yang Dilarang dalam Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999	106

